

Transformasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Dki Jakarta 2017

Dina Fadiyah

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945

dinafadiyah@hotmail.com

Abstrak

Tulisan ini menganalisa transformasi partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta pada tahun 2017. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut, partisipasi masyarakat sangat tinggi, salah satunya terlihat dari berbagai aksi selama masa pemilihan. Masyarakat yang dahulu pasif, secara tiba-tiba menjadi partisipatif. Masyarakat DKI Jakarta yang dikenal apatis, menjadi sangat peduli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tinjauan teori partisipasi. Hipotesa dari penelitian ini bahwa perubahan masyarakat dari pasif dan cenderung apatis terhadap kontestasi politik menjadi masyarakat yang aktif dan partisipatif karena suatu faktor yang sangat krusial yaitu adanya aktor yang "menarik" perhatian masyarakat.

Kata Kunci: *Kontestasi Elektoral; Partisipasi; Partisipasi Masyarakat;*

Abstract

This paper analyzes the transformation of public participation in the election of regional heads in DKI Jakarta in 2017. In the 2017 Jakarta Regional Head Election, the people participation is very high, one of which is seen from various actions during the election period. The formerly passive society suddenly became participatory. The people of DKI Jakarta, known as apathetic, become very concerned. This research uses descriptive qualitative method with a review of participation theory. The hypothesis of this study that the change of society from passive and apathetic tendency to political contestation become active and participative society because a very crucial factor is the existence of actors who "attract".

Keywords: *Electoral contestation; participation; people participation;*

Pendahuluan

Pemilu merupakan tonggak penting yang dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Selain itu, pemilu juga digolongkan sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu

negara telah melaksanakan proses pemilu maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara dengan tingkat demokrasi yang baik.

Sebagai konsekuensi negara demokrasi, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum sejak tahun 1955. Namun jika dilihat dari aspek

partisipasi politik dalam sejarah pesta demokrasi di Indonesia, pemilu tahun 1999 merupakan awal penurunan tingkat partisipasi politik pemilih dan mulai meningkatnya angka golongan putih (golput).

Sejak tahun 1999 hingga sekarang, tingkat partisipasi masyarakat di setiap pemilihan umum selalu mengalami penurunan. Padahal, Negara yang menganut sistem demokrasi yang baik, ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang baik pula.

Fakta tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, justru ketika arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang

terbuka. Fenomena tersebut sepertinya menguatkan pernyataan Anthony Giddens (1999) dalam bukunya *Runaway World, How Globalisation is Reshaping Our Lives*, “haruskah kita menerima lembaga-lembaga demokrasi tersingkir dari titik di mana demokrasi sedang marak” (Soebagio. 2008).

Tentunya potensi golput dalam pesta demokrasi nasional maupun lokal tersebut cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Sebab potensi golput yang eskalasinya meningkat dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi karena merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik.

Tabel 1 Tingkat partisipasi pemilih dan golput dalam pemilu di Indonesia

NO. 1	PEMILU	TINGKAT PARTISIPASI	TINGKAT GOLPUT
1	1955	91,1%	8,6%
2	1971	96,6%	3,4%
3	1977	96,5%	3,5%
4	1982	96,5%	3,5%
5	1987	96,4%	3,6%
6	1992	95,1%	4,9%
7	1997	93,6%	6,4%
8	1999	92,6%	7,3%
9	Pileg 2004	84,1%	15,9%
10	Pilpres 2005 - Putaran I	78,2%	21,8%
11	Pilpres 2004 - Putaran II	76,6%	23,4%
12	Pileg 2009	70,7%	29,3%
13	Pilpres 2009	71,7%	28,3%
14	Pileg 2014	75,2%	24,8%
15	Pilpres 2014	70,9%	29,1%

Sumber: KPU
 ANALISIS GOLONGAN PUTIH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI INDONESIA oleh H. Soebagio, DEMOKRASI DAN GOLONGAN PUTIH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN DEMOKRASI DI INDONESIA oleh H. Soebagio
 Rappler Indonesia @RapplerID

Sumber diolah dari <https://www.rappler.com/indonesia/berita/157558-golput-partisipasi-masyarakat-pemilu-pilkada>

Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik tersebut, berbanding terbalik dengan partisipasi masyarakat pada pilrukada DKI Jakarta 2017. Dalam

pilrukada tersebut, tidak hanya masyarakat DKI Jakarta yang berperan aktif selama masa pemilihan. Masyarakat dari luar Jakarta pun ikut aktif dan berpartisipasi

pada pilkada ini. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi selama sejarah kontestasi politik di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.

Peningkatan partisipasi dalam pilkada tersebut dapat menjadi tolak ukur bahwa partisipasi masyarakat saat ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Bahwa partisipasi masyarakat Indonesia saat ini sangat dinamis semenjak diadakannya pilkada. Seolah pilkada menjadi momentum yang penting bagi masyarakat Indonesia, dimana masyarakat Indonesia dapat berubah dengan cepat, dinamis dan tanpa ada *rule* yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat dengan sendirinya merubah diri yang dahulunya pasif menjadi partisipatif. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami bagaimana transformasi partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta pada tahun 2017.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, untuk mengungkap fenomena yang terkait dengan keberadaan upeti dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Atau dengan kata lain penelitian ini mengungkap apa yang ada di balik

prilaku masyarakat terkait realitas yang ada (Y.A Hilman. 2018).

Jenis data dalam tulisan ini antara lain hasil survei, surat kabar, dokumen, dan juga hasil penelitian lainnya. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dikodifikasikan kemudian dianalisis (Y.A Hilman. 2018)

Hasil dan Pembahasan Partisipasi Politik

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Didalam kamus besar bahasa Indonesia partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan (keikutsertaan) (KBBI. 2005). Sedangkan dalam kamus sosiologi *participation* ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu (Soekanto, 1993).

Definisi lain menyebutkan partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan (Soetrisno, 1995).

Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupun normatif terutama harus menekankan bahwa segala perkembangan

masyarakat dan pembangunan merupakan proses yang hanya bisa berhasil jika dijalankan bukan saja bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyat sendiri, terlebih orang miskin (Muller, 2006).

Masyarakat harus ikut secara aktif dalam menentukan dan menjalankan upaya dan program bantuan dari pemerintah, dan dengan demikian dapat menentukan keadaan hidup mereka sendiri mulai dari saat pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasannya hingga perawatan suatu program. Kesimpulannya definisi partisipasi merupakan sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam penjelasan ini partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri. Artinya partisipasi mengaktifkan gagasan HAM, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Sebagai suatu proses

dalam pengembangan masyarakat, partisipasi berkaitan dengan HAM dengan cara lain.

Berjalannya proses-proses dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif adalah suatu kontribusi signifikan warga negaranya, merupakan proses yang diharapkan dan normal dalam suatu upaya pembuat keputusan. Dalam arti partisipasi alat dan juga tujuan, karena membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka jalan bagi tercapainya HAM bagi setiap warga negara. Sebagai sebuah tujuan partisipasi menghasilkan pemberdayaan yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya. Menurut Oakley et al. sebagaimana dalam Jim Ife sebutkan ada perbandingan antara partisipasi sebagai cara dan sebagai tujuan (Jim Ife, Tesoreiro, 2018).

Partisipasi Sebagai Cara	Partisipasi Sebagai Tujuan
Berimplikasi pada penggunaan partisipasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan program. Penekanan pada mencapai tujuan dan tidak terlalu pada aktifitas partisipasi itu sendiri. Lebih umum dalam program-program pemerintah, yang pertimbangan utamanya adalah untuk menggerakkan masyarakat dan melibatkan mereka dalam meningkatkan efisiensi system penyampaian. Partisipasi umumnya jangka pendek. Partisipasi sebagai cara merupakan bentuk pasif dari partisipasi.	Berupaya memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti. Berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan. Fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pandangan ini relatif kurang disukai oleh badan-badan pemerintah. Pada prinsipnya LSM setuju dengan pandangan ini. Partisipasi dipandang sebagai suatu proses jangka panjang. Partisipasi sebagai tujuan relatif lebih aktif dan dinamis.

Tabel 2 perbandingan Partisipasi
 Sumber diolah : dari (Jim Ife, Tesoreiro, 2018)

Berdasarkan perbandingan partisipasi diatas yang lebih condong pada pemberdayaan masyarakat adalah pada partisipasi sebagai tujuan. Seperti yang disebutkan partisipasi sebagai tujuan bahwa masyarakat lebih diutamakan dalam pembangunan. Dalam hal ini tidak hanya sebatas program berjalan saja tetapi sampai berkelanjutan dengan proses jangka panjang. Sedangkan pada partisipasi sebagai cara hanya membutuhkan program berjalan saja tetapi masyarakat tidak peduli baik tidaknya untuk ke depan dan proses yang dibutuhkan jangka pendek.

Transformasi Partisipasi Masyarakat: Dari Masyarakat Pasif Menuju Partisipatif

Berbicara mengenai partisipasi masyarakat, bukanlah hal yang baru. Wacana ataupun isu mengenai betapa pentingnya partisipasi masyarakat sejak jaman Orde Baru sudah dikumandangkan. Namun nyatanya hal itu sia-sia belaka, karena pelaksanaanya yang jauh dari harapan. Wacana partisipasi semakin nyaring ketika kebijakan otonomi daerah direalisasikan melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang efektif berlaku awal 2001. Harapan guna meningkatnya partisipasi masyarakat

semakin membesar karena melalui kebijakan otonomi daerah ini, jarak antara pembuatan kebijakan dan masyarakat seharusnya akan semakin dekat.

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM (Hak Asasi Manusia), hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokratis *deliberative*. Sebagai suatu proses dalam pengembangan masyarakat, partisipasi berkaitan dengan HAM dengan cara lainnya. Jika HAM lebih dari sekedar pernyataan dalam deklarasi yaitu jika partisipasi berakibat membangun secara aktif kultur HAM sehingga menjamin berjalannya proses-proses dalam pengembangan masyarakat secara partisipatif adalah suatu kontribusi signifikan bagi pembangunan kultur HAM, suatu kebudayaan yang partisipasi warga negaranya merupakan proses yang diharapkan dan normal dalam suatu upaya pembuatan keputusan.

Partisipasi masyarakat dianggap sangat penting dalam demokrasi. Selain masyarakat dijuluki sebagai “*stakeholder*” selain pemerintah, masyarakat juga dianggap orang yang paling tahu dan merasakan apa saja yang mereka butuhkan. Asumsinya, partisipasi masyarakat adalah upaya untuk menanggulangi permasalahan masyarakat itu sendiri, sudah sepatutnya masyarakatlah yang berperan aktif dalam proses pendemokratisasian Negara ini, salah satunya melalui peran serta dalam proses pemilihan kepala daerah.

Dalam kasus pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, animo masyarakat yang muncul sangat luar biasa. Hal ini dirasa penting karena kita semua tahu bahwa tingkat partisipasi masyarakat, tingkat apatisme masyarakat dan tingkat golput masyarakat semakin tahun semakin meningkat, tetapi didalam pilkada DKI Jakarta 2017, itu semua tidak terjadi dan bahkan justru sebaliknya. Tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi dan bahkan banyak “*action*” yang diambil oleh masyarakat selama masa pemilihan. Salah satu contohnya adanya aksi bela Islam 212, 214. Partisipasi masyarakat yang terjadi dalam satu waktu tersebut sangat jarang sekali terjadi dalam perpolitikan di Indonesia, terlihat dari data yang ada bahwa memang

dari tahun ketahun partisipasi masyarakat cenderung menurun di setiap pemilihan, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Pasca reformasi, pada pemilu 1999 tingkat partisipasi memilih 92,6 persen dan jumlah golput 7,3 persen.

Angka partisipasi yang memprihatinkan terjadi pada pemilu 2004, yakni turun hingga 84,1 persen dan jumlah golput meningkat hingga 15,9 persen. Pada pilpres putaran pertama tingkat partisipasi politik memilih mencapai 78,2 persen dan jumlah golput 21,8 persen, sedangkan pada pilpres putaran kedua tingkat partisipasi politik memilih mencapai 76,6 persen dan jumlah golput 23,4 persen. Pada pemilu legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi politik memilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9 persen dan jumlah golput semakin meningkat yaitu 29,1 persen serta pada pilpres 2009 tingkat partisipasi politik memilih mencapai 71,7 persen dan jumlah golput mencapai 28,3 persen (Sumber diolah dari: <https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>).

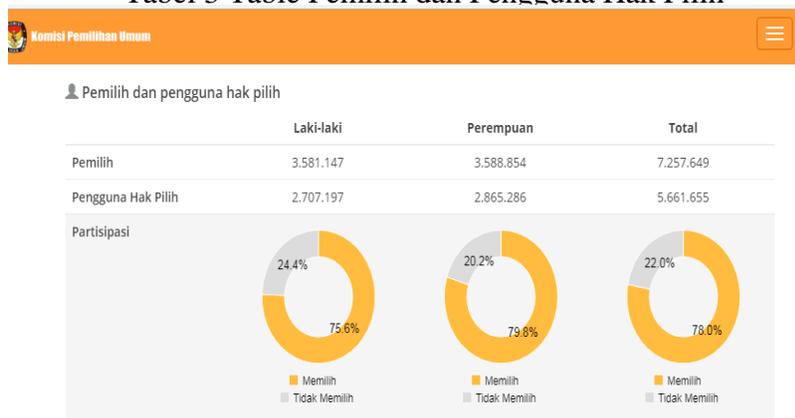
Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang signifikan. Tidak terkecuali partisipasi

masyarakat dalam tingkat pemilihan kepala daerah, khususnya di DKI Jakarta. Pada tahun 2012 dimana tahun tersebut adalah tahun terakhir diadakannya pilkada di DKI Jakarta sebelum tahun 2017, pada tahun tersebut tingkat partisipasi masyarakat hanya mencapai 64% pada putaran pertama dan 66% pada putaran kedua (Sumber diolah dari <https://news.detik.com/berita/d-3423800/indikator->

[partisipasi-warga-dki-di-pilgub-2017-naik-dibanding-2012](https://news.detik.com/berita/d-3423800/indikator-partisipasi-warga-dki-di-pilgub-2017-naik-dibanding-2012))

Berubahnya tingkat partisipasi masyarakat yang sangat signifikan tersebut membuat perubahan yang sangat terlihat pula pada perolehan pemilih dan pengguna hak pilih, serta total suara yang dihasilkan dalam Pemilu Pilkada DKI Jakarta 2017. Seperti table dibawah ini :

Tabel 3 Table Pemilih dan Pengguna Hak Pilih



Sumber diolah dari : (https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta)

Dari table tersebut bisa dilihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat mencapai 78% dan itu berarti tingkat kepedulian masyarakat terhadap Pemilu Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat tinggi, tingkat keikutsertaan masyarakat dalam ajang kontestasi politik tersebut sangat tinggi. Tidak terkecuali teman-teman masyarakat

yang mempunyai keterbatasan atau kaum disabilitas. Tingkat partisipasi kaum disabilitas bahkan hampir 100% hal itu menambah alasan bahwa kontestasi politik yang terjadi di Jakarta kali ini sangat menyita perhatian masyarakat. Seperti table berikut:

Table 4 Table Suara Sah dan Pemilih Disabilitas



Sumber diolah dari : (https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta)

Dari data diatas menambah pembuktian bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada DKI Jakarta 2017 sangat tinggi. Hal ini membuktikan bahwa partisipasi yang hadir di masyarakat tidak hanya partisipasi cara, melainkan juga partisipasi tujuan. Dimana masyarakat tidak hanya melihat program yang diusung, pembangunan, tujuan jangka pendek, dsb, tetapi masyarakat melihat itu semua dari kacamata partisipas sebagai tujuan, yaitu semuanya untuk kepentingan rakyat dan jangka panjang. Hal ini membuat masyarakat yang dahulu pasif kini menjadi aktif dan dinamis.

Perubahan yang terjadi dalam ajang Pemilukada tersebut ternyata terjadi karena adanya aktor atau kandidat calon Gubernur DKI Jakarta yang menarik perhatian masyarakat. Dimana kita semua tahu bahwa Ahok dianggap telah menistakan salah satu agama yaitu Muslim dan saat ini notebene

beliau sudah ditahan. Selama sejarah perpolitikan Indonesia, baru kali ini ada fenomena baru yang begitu menarik perhatian masyarakat. Ahok dianggap telah melecehkan agama Islam dengan membawa-bawa surat Al-Maidah, dimana isi surat tersebut intinya bahwa tidak boleh memilih pemimpin yang bukan Islam.

Sontak kata-kata Ahok tersebut menjadi viral, baik di dunia maya, media cetak ataupun media televisi. Statement yang dikeluarkan Ahok itu dianggap “rasis” dan melecehkan agama Islam karena beliau sudah membawa-bawa kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran. Pernyataan Ahok dianggap tidak pantas sebagai pemimpin karena dianggap bukan ranahnya membicarakan ayat suci Al-Quran sebab dia adalah seorang nasrani. Karena kasus tersebut terjadi banyak aksi-aksi yang mengatasnamakan “Aksi Bela Islam” yang dilakukan beberapa kali. Dan hal tersebut menjadi salah satu

daya tarik tersendiri bagi masyarakat DKI Jakarta untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan.

Fenomena ini dianggap menjadi “pemicu” berbagai konflik yang terjadi menjelang Pilkada. Banyak masyarakat yang menjadi bermusuhan, bahkan ada beberapa kasus dimana saudara kandung juga ikut bermusuhan karena berbeda pendapat dan pilihan dalam Pemilu DKI Jakarta 2017. Konflik yang terjadi sangat nyata, baik itu di media social yang sangat liar menyebarkan berita dengan membabi buta dan di kehidupan sosial nyata juga banyak sekali gesekan-gesekan yang terjadi akibat isu tersebut. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat tidak apatis terhadap perpolitikan di Indonesia, hanya saja selama ini terlihat pasif karena tidak adanya aktor yang menarik perhatian masyarakat.

Kesimpulan

Dari pemaparan diatas, benang merah yang bisa diambil adalah bahwa dengan adanya aktor atau kandidat pemimpin yang dapat menarik perhatian masyarakat rupanya menjadi pemicu meningkatnya partisipasi masyarakat. Pemilu DKI Jakarta 2017 adalah bukti bahwa masyarakat sesungguhnya sangat

aktif jika menemui aktor atau kandidat pemimpin yang “fenomenal” seperti Ahok.

Seperti teori partisipasi yang disusun oleh Oakley, bahwa partisipasi tidak hanya sekedar sebagai cara tetapi partisipasi adalah sebuah tujuan. Maksud dari tujuan tersebut adalah untuk memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan mereka sendiri secara lebih berarti, berupaya untuk menjamin peningkatan peran rakyat dalam inisiatif-inisiatif pembangunan, fokus pada peningkatan kemampuan rakyat untuk berpartisipasi bukan sekedar mencapai tujuan-tujuan proyek yang sudah ditetapkan sebelumnya dsb. Itu semua dapat dihadirkan dalam kontestasi politik yang terjadi di DKI Jakarta, dimana partisipasi sebagai tujuan sangat terasa hadir dalam kasus tersebut sehingga membuat masyarakat menjadi lebih aktif dan dinamis.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang selama ini sudah semakin melemah bisa ditingkatkan kembali yaitu dengan adanya aktor yang dapat menarik perhatian masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam suatu pemilihan. Aktor yang dapat menarik perhatian masyarakat tersebut dirasa penting untuk meningkatkan animo, partisipasi dan bahkan membuat masyarakat menjadi aktif dalam pemilihan. Pemilu DKI Jakarta

2017 menjadi ajang puncaknya partisipasi masyarakat DKI Jakarta dalam memilih, hal tersebut tentunya dipicu oleh adanya aktor yang menarik perhatian masyarakat yaitu Ahok.

Dalam kasus tersebut, sesungguhnya menjadi dilema dimana kasus tersebut tidak hanya membawa efek positif yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga menimbulkan banyak efek negative seperti misalnya maraknya konflik yang dipicu oleh media social yang membabi buta dalam memberitakan sesuatu sehingga banyak hoax yang ditimbulkan. Dari fenomena tersebut kita bisa mengambil sisi positif dan sisi negatifnya, itu dua sisi yang pasti timbul dalam setiap fenomena di suatu pemilihan. Dengan begitu, Indonesia khususnya masyarakat Jakarta bisa membuktikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilihan masih amat tinggi, dibuktikan dengan berbagai survey yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang mengatakan bahwa angka partisipasi masyarakat dalam Pemilihan DKI Jakarta 2017 sangat signifikan.

Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional, (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka

“Golput Partisipasi Masyarakat Pemilu Pilkada” diakses dari <https://www.rappler.com/indonesia/berita/157558-golput-partisipasi-masyarakat-pemilu-pilkada>

Ife, Jim dan Frank Tesoreiro. (2008). Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ini Tingkat Partisipasi Pemilih dari Pemilu diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html>

Indikator Partisipasi Warga DKI di Pilgub 2017 <https://news.detik.com/berita/d-3423800/indikator-partisipasi-warga-dki-di-pilgub-2017-naik-dibanding-2012> diakses dari

Muller, Johannes. (2006). Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Soebagio, H. (2008). Implikasi Golongan Putih Dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Di Indonesia. Jurnal Makara, Sosial Humaniora, Volume 12, No. 2

Soejono Soekanto, Soejono. (1993). Kamus Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soetrisno, Loekman. (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius.

Situs resmi KPU http://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t1/dki_jakarta

Y.A Hilman, (2018). Analisis Peta Politik Kandidat Calon Gubernur dan Arah Koalisi pada Kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Wacana Politik*, (3)1, 29 -39, <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.15472>.

Y.A Hilman, (2018). Praktik Upeti dalam Tradisi Hegemoni Nusantara (Tela'ah kritis terhadap praktik mengakar KKN di Indonesia. *Historia*, (6)2, 309 - 320, [10.24127/hj.v6i2.1268](https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1268)